



Jelaskan SILPA

GUBERNUR Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menanggapi kritikan beberapa anggota DPRD Kalbar soal rendahnya serapan anggaran dan besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) APBD TA 2019.



Sutarmidji

ditunda ke tahun 2020, yang nilainya sekitar Rp100 miliar.

Pertama menurutnya perkiraan SILPA yang mencapai sekitar Rp1,1 triliun ia sampaikan pada sekitar tanggal 20 Desember 2019. Sementara faktanya di akhir tahun SILPA yang ada hanya sekitar Rp570 miliar. Salah satu penyebabnya ada sekitar 11 proyek sengaja

◆ Ke Halaman 15 kolom 5

Jelaskan SILPA

Sambungan dari halaman 9

“Yang besar lainnya itu peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar 103 persen lebih, berarti lebih dari tiga persen PAD kita (melampaui target), itu kan bagus. Kemudian penghematan-penghematan, itu saja sebenarnya,” ungkapnya kepada awak media, Jumat (10/1).

Untuk itu ke depan ia berharap serapan APBD TA 2020 jauh lebih baik. Mengingat di APBD 2019 ia tidak banyak bisa melakukan perubahan. Sebab struktur APBD sudah jadi sebelum dirinya dilantik pada 2018. Pergeseran anggaran hanya bisa dilakukan sedikit. “Nah APBD 2020 itu murni, sudah mengimplementasikan saya,” ucapnya.

Dalam hal ini ia tidak ingin menyalahkan pihak manapun. Dan Midji sapaan akrabnya mengaku, sebagai pelaksana bertanggung jawab penuh terhadap serapan atau penggunaan anggaran di 2019.

“Makanya (tidak sampai Rp1,1 triliun), kan bergerak terus sampai tanggal 31 Desember, makanya harus dipahami seperti itu,” pungkasnya.

Termasuk soal kritikan terhadap langkah yang diambil menetapkan pimpinan Organisasi Kepala Daerah (OPD), ia menjawab semua sudah dilakukan sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pertama penempatan sudah ada persetujuan KASN dan yang kedua ada tim seleksi lelang jabatan yang independen. “Evaluasi ya mereka sudah dua tahun (menjabat). Itu tidak ada yang salah,” katanya.

Seperti dicontohkannya perpindahan Kepala BPKPD Mahmudah ke Badan Pendapatan Daerah. Itu dikarenakan BPKPD dipecah menjadi dua OPD. “Keuangan sendiri, pendapatan sendiri, nah Ibu Mahmudah di pendapatan, nanti keuangannya kami Plt kan, begitu,” paparnya.

Kemudian contoh lainnya

untuk pertanian dan perkebunan dilakukan pertukaran pimpinan. Heronimus Hero yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pindah ke Dinas Perkebunan. Sementara Florentinus Anum yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perkebunan kini menjadi Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Pemindahan itu menurutnya untuk mencari solusi tentang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap terjadi setiap tahunnya. “Pak Hero sudah paham tentang pertanian sekarang di perkebunan, Pak Anum paham perkebunan sekarang di pertanian, nah dia berdua ini kan paham betul karakter masyarakat pedalaman, nah dia harusnya bisa mencari solusi dengan kolaborasi tadi itu, semua ada pertimbangan, bukan ada suka tak suka,” tegashya. (bar)